

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan dan Saran

V.1.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2019–2024 terhadap persepsi publik mengenai penyalahgunaan kekuasaan, dengan fokus pada tiga indikator utama, yaitu dinasti politik, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan kebebasan sipil. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa persepsi publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo berada pada kategori tinggi, yang tercermin dari nilai rata-rata seluruh indikator kepemimpinan yang berada di atas angka 3,30. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memersepsikan kepemimpinan Presiden Joko Widodo sebagai kepemimpinan yang kuat, terpusat, dan cenderung dominatif.

Temuan ini mengindikasikan bahwa dalam pandangan publik, pola kepemimpinan presiden selama periode 2019–2024 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi publik yang optimal dalam proses pengambilan keputusan politik. Kebijakan-kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat dinilai lebih banyak ditentukan secara top-down, sehingga menimbulkan persepsi adanya jarak antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi tersebut tercermin secara jelas pada tingginya tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja disahkan tanpa pertimbangan aspirasi publik secara adil, yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi sebesar 3,43.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penyalahgunaan Kekuasaan yang terdiri atas indikator Dinasti Politik, Pelemahan KPK, dan Kebebasan Sipil juga memperoleh nilai rata-rata keseluruhan di atas angka 3,30. Hal ini mengindikasikan bahwa publik cenderung setuju terhadap adanya praktik-praktik yang dipersepsikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indikator Dinasti Politik memperoleh nilai

rata-rata tertinggi, khususnya pada pernyataan yang menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024 sebagai bagian dari upaya pembentukan dinasti politik. Persepsi ini menunjukkan adanya kekhawatiran publik terhadap penggunaan kekuasaan politik yang dinilai berpotensi menguntungkan kepentingan keluarga dan kelompok tertentu.

Pada indikator Pelemahan KPK, publik memersepsikan bahwa revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 dan pembentukan Dewan Pengawas telah berdampak pada berkurangnya independensi lembaga antikorupsi tersebut. Tingginya nilai rata-rata pada indikator ini menunjukkan bahwa pelemahan KPK dipandang sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan struktural yang berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi serta menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas tata kelola pemerintahan. Sementara itu, pada indikator Kebebasan Sipil, responden menilai bahwa tindakan aparat terhadap jurnalis dan demonstran dalam berbagai peristiwa unjuk rasa mencerminkan adanya kecenderungan penggunaan kekuasaan yang represif, sehingga membatasi kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam ruang publik.

Secara kuantitatif, hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa Kepemimpinan Presiden berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan. Nilai koefisien regresi sebesar 1,884 dengan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$) serta nilai koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,743 menunjukkan bahwa kepemimpinan presiden memiliki kontribusi yang besar dalam membentuk persepsi publik terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa semakin kuat persepsi publik terhadap gaya kepemimpinan yang sentralistis dan dominatif, maka semakin tinggi pula persepsi terhadap terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam pemerintahan.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama periode 2019–2024 dipersepsikan publik sebagai kepemimpinan yang kuat dan efektif dalam pengambilan keputusan, namun di sisi lain memiliki kecenderungan dominasi kekuasaan yang berpotensi mengurangi kualitas demokrasi substantif. Pola kepemimpinan yang terpusat, minim partisipasi publik, serta lemahnya mekanisme pengendalian dipersepsikan sebagai faktor yang berkontribusi terhadap munculnya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan

dalam ranah politik, hukum, dan sosial. Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan agar efektivitas pemerintahan tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi.

V.1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, baik bagi pemerintah, lembaga negara, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya.

1. Saran bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat komitmen terhadap prinsip *good governance* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan non-intervensi keluarga dalam proses politik. Untuk mencegah lahirnya persepsi dinasti politik, pemerintah harus memastikan bahwa setiap proses rekrutmen politik tetap mengutamakan meritokrasi dan kompetisi yang adil. Selain itu, pemerintah perlu menunjukkan sikap responsif terhadap kritik publik dengan tidak menggunakan instrumen hukum secara berlebihan yang dapat merugikan kebebasan berpendapat.

2. Saran bagi KPK dan Institusi Penegak Hukum

KPK perlu mengembalikan kepercayaan publik melalui peningkatan independensi, profesionalisme, dan konsistensi dalam menangani kasus korupsi. Pemerintah dan DPR juga disarankan untuk mengevaluasi kembali regulasi yang menurunkan independensi KPK, serta merumuskan kebijakan baru yang lebih mendukung pemberantasan korupsi. Penguatan lembaga antikorupsi merupakan langkah penting untuk menekan penyalahgunaan kekuasaan di masa mendatang.

3. Saran bagi Masyarakat dan Civil Society

Masyarakat perlu memperkuat partisipasi politik secara aktif dan kritis dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Organisasi masyarakat sipil juga perlu memperluas ruang advokasi terkait kebebasan sipil, anti-korupsi, dan integritas politik. Kesadaran publik terhadap isu demokrasi menjadi kunci penting untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan.

4. Saran bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel tambahan seperti orientasi politik responden, penggunaan media, atau tingkat kepercayaan terhadap institusi negara. Penelitian mendalam menggunakan pendekatan kualitatif seperti wawancara elite, studi kasus, atau analisis wacana juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kekuasaan dan persepsi publik. Selain itu, perluasan sampel ke wilayah yang lebih beragam dapat meningkatkan akurasi temuan penelitian.